



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN KOMISI VI DPR RI  
MENGENAI HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I  
TERHADAP**

**RUU TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI  
KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA  
(*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA*)**

**PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
TANGGAL 30 AGUSTUS 2022**

---

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam sejahtera untuk kita semua  
Syaloom  
Om Swastiastu  
Namo Buddhaya  
Salam Kebajikan*

Yth

1. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI;
2. Saudara Menteri Perdagangan;
3. Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili;
4. Saudara Menteri Luar Negeri RI atau yang mewakili;
5. Saudara-saudara Anggota DPR RI;
6. Hadirin sekalian yang kami muliakan,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat untuk mendengarkan Laporan Komisi VI DPR RI mengenai hasil Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang tentang

Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*)/ IK CEPA.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan,  
Hadirin yang kami muliakan,**

Perkenankanlah saya mewakili Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI menyampaikan Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang IK CEPA dalam Rapat Paripurna hari ini.

Presiden RI telah mengirimkan Surat Nomor: R-20/Pres/04/2022 tanggal 27 April 2022 mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan IK CEPA dan menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Perdagangan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk mewakili Pemerintah dalam membahas Rancangan Undang-Undang tersebut. Selanjutnya melalui Surat No:T/584/PW.01/05/2022, tanggal 25 Mei 2022, Pimpinan DPR RI menugaskan Komisi VI untuk membahas rencana pengesahan perjanjian tersebut bersama Pemerintah.

Menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi VI DPR RI telah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka pendalaman terhadap RUU IK CEPA. Pada tanggal 5 Juli 2022 telah dilaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah (Menteri Perdagangan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Luar Negeri) untuk mendengarkan penjelasan Pemerintah, pandangan umum Fraksi-Fraksi dan jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU IK CEPA.

Selanjutnya dilakukan pembahasan materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang terdiri dari 17 DIM batang tubuh dan 10 DIM Penjelasan RUU IK CEPA.

Dari beberapa DIM yang dibahas, terdapat satu perubahan pada batang tubuh yaitu DIM Nomor 16 berkaitan dengan pengundangan Undang-Undang yang sebelumnya ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM menjadi Menteri Sekretaris Negara, sesuai amanat Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan,  
Hadirin yang kami muliakan.**

Dalam Pembicaraan Tingkat I, masing-masing Fraksi menyampaikan Pendapat Mini Fraksi dan menyetujui bahwa Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tersebut harus melindungi kepentingan nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan.

Dalam Pendapat Mini Fraksi disampaikan implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi dengan Pemerintah Republik Korea akan memberikan manfaat lebih bagi Indonesia, di antaranya, perluasan akses pasar dan ekspor produk barang/ jasa ke Republik Korea; peningkatan PDB dan daya saing produk Indonesia; penguatan industri dalam negeri; peningkatan arus investasi ke Indonesia; pengembangan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional Indonesia pasca pandemi Covid-19; dan meningkatkan neraca perdagangan Indonesia.

Selain menawarkan berbagai peluang, Pemerintah juga harus mengantisipasi dampak Perjanjian Kemitraan Ekonomi tersebut bagi Indonesia, di antaranya, kewajiban pembukaan akses pasar untuk produk-produk dari Republik Korea; kewajiban Indonesia untuk memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh penanam modal dari Republik Korea dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; penyiapan industri dalam negeri; pemberian jaminan proteksi terhadap produk nasional dan *brand* nasional serta produk UMKM; Penyederhanaan birokrasi perizinan; penguatan struktur dan kelembagaan ekonomi; sosialisasi kepada pelaku usaha nasional terkait Perjanjian Kemitraan Ekonomi dengan Republik Korea.

Dalam Pembicaraan Tingkat I tersebut, seluruh Fraksi di Komisi VI DPR RI dan Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan IK CEPA untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II dalam rangka Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan,  
Hadirin yang kami muliakan,**

Sebelum mengakhiri Laporan Komisi VI DPR RI hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Para Anggota Dewan yang terhormat yang telah mempercayakan Komisi VI DPR RI untuk melaksanakan tugas pembahasan terhadap RUU ini. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Para Anggota Komisi VI DPR RI dan kepada Tim Interdep Pemerintah yang telah secara kooperatif, bersungguh-sungguh, dan bekerja keras dalam pelaksanaan pembahasan RUU ini. Selanjutnya terima kasih juga kepada

Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi VI DPR RI, Badan Keahlian DPR RI dan Pusat Penelitian. Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan wartawan, media massa, pemberitaan dan lain-lain yang telah berkontribusi dalam peliputan kegiatan RUU IK CEPA.

Demikianlah Laporan Komisi VI DPR RI disampaikan dan kami mengharapkan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini terhadap RUU tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden RI guna disahkan menjadi Undang-Undang.

***Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh  
Om shanti shanti shanti om  
Namo Buddhaya***

Jakarta, 30 Agustus 2022  
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI

TTD

**MARTIN MANURUNG,S.E.,M.A.  
A-352**